

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan :
- 3. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
- 4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Nomor dan Tanggal) :
- 5. Alamat Lengkap termasuk :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :
- 6. Nama Pemohon :
- 7. NIK :
- 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon :
- 9. Kontak Pemohon :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

- A. RENCANA KEGIATAN
Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu lokasi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha

:
2. Lokasi Proyek

:
- Alamat

:
- Kecamatan

:
- Kota

:
- Provinsi

:
- Kode Pos

:

3. Produksi Per Tahun

:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun

:

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun

:

Rp

/US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan

:

..... m²/Ha^{*)}
- *) Coret yang tidak perlu*

6. Tenaga Kerja Indonesia

:
- Laki-laki

:

..... orang
- Perempuan

:

..... orang
- Tenaga Kerja Asing

:

..... orang

7. Investasi (Rp)

:
- a. Modal Tetap

:
- ~ Pembelian dan Pematangan Tanah

:

.....
- ~ Bangunan / Gedung

:

.....
- ~ Mesin/Peralatan dan Suku Cadang

:

.....
- ~ Lain-lain

:

.....
- Sub Jumlah

:

.....
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*)

:

.....
- Jumlah^{**)}

:

.....
- *) coret yang tidak perlu*
- **) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.*

8. Waktu Penyelesaian Proyek

:

..... bulan
- (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)*

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp)

:
- a. Modal Sendiri

:

.....
- b. Laba ditanam kembali

:

.....
- c. Pinjaman

:

.....
- ~ Pinjaman Dalam Negeri

:

.....
- ~ Pinjaman Luar Negeri

:

.....
- Jumlah ^{**)}

:

.....

*) Coret yang tidak perlu
**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2. Modal Perseroan (Rp)
- a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor **) :
- *) Coret yang tidak perlu
**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

a. Pemegang Saham Asing	No. ID/KTP	Rp	% **)
.....
.....
Sub Total			
b. Pemegang Saham Indonesia		Rp	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***)		100%

*) Bagi PMDN yang diisi hanya Pemegang Saham Indonesia saja
**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham
***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

- 1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....
Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama terang, Tanda tangan, Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
 - a. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - b. Foto Copy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Foto Copy KTP Pemegang Saham.
 - e. Foto Copy NPWP Pemegang Saham.
2. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.